

**STRATEGI WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WLHI) DALAM  
MENJAGA STABILITAS POLITIK LOKAL: STUDI KASUS KONFLIK  
PERTAMBANGAN DI KALIMANTAN**

**Auerella Shalsabilla Agatha**

Politik Indonesia Terapan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: auerellashalsabillaa@gmail.com

**ABSTRACT**

The expansion of the extractive industry in Kalimantan not only triggers ecological degradation but also creates political volatility that threatens regional stability. This study explores the strategies of Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WLHI) in navigating agrarian conflicts to prevent social disintegration. Using a framework of Political Ecology and Transformative Conflict Management, this qualitative study examines how WLHI transforms mass resistance into a structured, formal-legal movement. The findings indicate that WLHI's strategies including strategic litigation, counter-mapping, and the strengthening of civic politics serve as a "safety valve" for local democracy. In conclusion, political stability in mining conflict zones is not achieved through repression, but rather through the inclusion of ecological justice agendas within the state's legal system

**Keywords:** WLHI, Political Ecology, Mining Conflicts, Political Stability, Strategic Litigation.

**ABSTRAK**

Eskalasi industri ekstraktif di Kalimantan tidak hanya memicu degradasi ekologis, tetapi juga menciptakan volatilitas politik yang mengancam stabilitas daerah. Penelitian ini mengeksplorasi strategi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WLHI) dalam menavigasi konflik agraria guna mencegah disintegrasi sosial. Dengan menggunakan kerangka teori Ekologi Politik dan Manajemen Konflik Transformatif, penelitian kualitatif ini membedah bagaimana WLHI mentransformasi resistensi massa menjadi gerakan legal-formal yang terstruktur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi WLHI yang mencakup litigasi strategis, counter-mapping, dan penguatan politik kewargaan berperan sebagai "katup penyelamat" (safety valve) bagi demokrasi lokal. Kesimpulannya, stabilitas politik di wilayah konflik tambang tidak dicapai melalui represi, melainkan melalui inklusi agenda keadilan ekologis ke dalam sistem hukum negara.

**Kata kunci:** WLHI, Ekologi Politik, Konflik Pertambangan, Stabilitas Politik, Litigasi Strategis.

**PENDAHULUAN**

Kalimantan merupakan salah satu wilayah strategis dalam peta ekonomi ekstraktif Indonesia yang ditandai dengan tingginya eksploitasi sumber daya alam seperti batu bara, bauksit, dan emas (Wirawan et al., 2025). Ekspansi industri pertambangan di wilayah ini mengalami peningkatan signifikan dalam dua dekade terakhir, seiring dengan kebijakan desentralisasi yang membuka ruang luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola perizinan sumber daya alam. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan bersifat asimetris dan cenderung melahirkan ketimpangan struktural. Dalam konteks ini, menunjukkan bahwa praktik "klientelisme lingkungan" menjadi fenomena yang mengemuka, di mana izin pertambangan seringkali digunakan sebagai instrumen politik untuk menopang kekuasaan lokal (Aspinall & Ward Berenschot, 2023)

Secara empiris, eskalasi industri ekstraktif di Kalimantan berkorelasi langsung dengan meningkatnya konflik agraria dan degradasi lingkungan. Data dari WALHI tahun 2024 menunjukkan bahwa dalam kurun

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

156

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



waktu lima tahun terakhir, konflik lahan di sektor pertambangan mengalami peningkatan signifikan, yang sebagian besar disebabkan oleh tumpang tindih antara wilayah konsesi perusahaan dengan wilayah kelola masyarakat adat. Kondisi ini tidak hanya memicu kerusakan ekologis, tetapi juga mengganggu basis ekonomi masyarakat lokal yang bergantung pada sektor pertanian dan sumber daya sungai.

Lebih jauh, konflik pertambangan di Kalimantan tidak dapat dipahami sebagai fenomena sporadis, melainkan sebagai manifestasi dari ketimpangan relasi kekuasaan antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal. Dalam perspektif ekologi politik, kondisi ini mencerminkan apa yang disebut sebagai “perampasan ruang” (territorialization), di mana negara melalui regulasi formal memberikan legitimasi kepada korporasi untuk menguasai ruang hidup masyarakat (Nugraha, 2025). Akibatnya, muncul akumulasi ketidakadilan yang berpotensi memicu instabilitas politik di tingkat lokal.

Dampak politik dari konflik ini tidak dapat diabaikan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pertambangan yang dianggap tidak adil berpotensi menurunkan legitimasi pemerintah serta memicu konflik horizontal maupun vertikal. Studi empiris yang dilakukan oleh Lubis et al., (2025) menunjukkan bahwa wilayah dengan intensitas konflik agraria yang tinggi memiliki probabilitas lebih besar mengalami eskalasi kekerasan sosial jika tidak tersedia mekanisme penyelesaian konflik yang efektif. Dalam konteks ini, stabilitas politik tidak lagi dapat dimaknai sekadar sebagai kondisi tanpa konflik, melainkan sebagai kemampuan sistem untuk mengelola konflik secara konstruktif dan institusional.

Di tengah kondisi tersebut, WALHI hadir sebagai aktor masyarakat sipil yang memainkan peran strategis dalam mengelola konflik pertambangan. WALHI tidak hanya berfungsi sebagai kelompok penekan (*pressure group*) yang mengkritisi kebijakan negara, tetapi juga sebagai mediator sosial yang mentransformasikan resistensi masyarakat menjadi gerakan advokasi yang terstruktur dan berbasis hukum. Melalui strategi litigasi strategis, WALHI mendorong penyelesaian konflik melalui jalur institusional, yang secara empiris terbukti mampu menurunkan potensi bentrokan fisik hingga 40% di wilayah konflik agraria (Ahmady et al., 2022).

Selain itu, WALHI juga mengembangkan strategi counter-mapping sebagai bentuk perlawanan berbasis data terhadap dominasi narasi negara dan korporasi (Paradise & Lubis, 2025). Dengan memanfaatkan teknologi *Geographic Information System* (GIS), WALHI bersama masyarakat adat menghasilkan peta tandingan yang berfungsi sebagai alat legitimasi dalam memperjuangkan hak atas wilayah kelola. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mendorong transparansi kebijakan serta mengurangi ketidakpastian politik akibat klaim lahan yang tumpang tindih (Judijanto et al., 2023).

Tidak kalah penting, WALHI juga memperkuat dimensi politik kewargaan melalui program literasi hukum dan pengorganisasian masyarakat. Strategi ini berperan dalam meningkatkan kesadaran kritis masyarakat sehingga mampu mengartikulasikan kepentingannya secara lebih rasional dan terorganisir. Menurut (Siti Khadijah Hidayat et al., 2024), penguatan kapasitas masyarakat di wilayah konflik sumber daya alam merupakan faktor kunci dalam menciptakan stabilitas politik yang bersifat organik dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih cenderung melihat WALHI hanya sebagai organisasi advokasi lingkungan yang berorientasi pada penolakan terhadap aktivitas pertambangan. Perspektif ini dinilai kurang komprehensif karena belum menempatkan peran WALHI dalam konteks stabilitas politik lokal. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih kritis dengan menempatkan strategi WALHI sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas politik melalui transformasi konflik dari bentuk destruktif menjadi konstruktif.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana strategi yang dijalankan oleh WALHI melalui litigasi strategis, counter-mapping, dan penguatan politik kewargaan mampu berkontribusi dalam menjaga stabilitas politik lokal di tengah konflik pertambangan di Kalimantan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian ekologi politik serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan pengelolaan konflik sumber daya alam di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi metode Socio-Legal Research (SLR). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik sosial (*law in action*) yang berinteraksi langsung dengan dinamika konflik pertambangan dan stabilitas politik lokal. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam strategi advokasi WALHI serta menganalisis dampaknya terhadap stabilitas politik lokal. Pendekatan yang digunakan meliputi: Pendekatan yuridis-sosiologis, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana regulasi seperti UU Minerba dan UU Cipta Kerja berkontribusi terhadap konflik pertambangan serta bagaimana WALHI meresponsnya melalui instrumen hukum. Pendekatan ekologi politik (*Political Ecology*), pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan bahwa konflik pertambangan bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga akibat ketimpangan struktur kekuasaan antara negara, korporasi, dan masyarakat (Piers Blaikie & Harold Brookfield, 1987). Dengan kombinasi ini, penelitian mampu menjelaskan hubungan antara konflik sumber daya, intervensi WALHI dan stabilitas politik lokal.

No	Variabel	Konsep/Definisi	Indikator	Sub-Indikator	Sumber Data	Teknik Analisis
1	<b>Strategi WALHI</b> (Variabel Independen)	Upaya sistematis yang dilakukan WALHI dalam mengelola konflik pertambangan melalui pendekatan hukum, spasial, dan pemberdayaan masyarakat	<b>Litigasi Strategis</b>	- Gugatan Citizen Lawsuit - Judicial Review - Advokasi kebijakan	Laporan WALHI (2020–2026), dokumen gugatan	Analisis kualitatif deskriptif
			<b>Counter-Mapping</b>	- Pemetaan wilayah adat - Penggunaan GIS - Validasi data spasial tandingan	Laporan WALHI, studi Robbins (2019)	Analisis tematik
			<b>Penguatan Politik Kewargaaan</b>	- Literasi politik masyarakat - Pengorganisasian komunitas - Peningkatan kesadaran hukum	Jurnal Ningsih (2022), dokumen advokasi	Analisis naratif
2	<b>Konflik Pertambangan</b> (Variabel Antara)	Ketegangan sosial, ekonomi, dan politik akibat aktivitas	<b>Akar Konflik</b>	- Tumpang tindih lahan - Degradasi lingkungan	Buku Aspinall & Berenschot (2023),	Analisis ekologi politik

		pertambangan dan tumpang tindih lahan		- Ketimpangan kekuasaan	WALHI	
			<b>Bentuk Konflik</b>	- Protes masyarakat - Sengketa hukum - Potensi kekerasan	Data konflik agraria, jurnal Warat (2021)	Analisis deskriptif
3	<b>Stabilitas Politik Lokal</b> (Variabel Dependen)	Kondisi terjaganya ketertiban, legitimasi pemerintah, dan minimnya konflik terbuka di daerah	<b>Reduksi Konflik Fisik</b>	- Penurunan bentrokan - Minim aksi anarkis	Jurnal Warat (2021)	Analisis komparatif
			<b>Legitimasi Institusi</b>	- Kepercayaan masyarakat - Respons pemerintah terhadap konflik	Literatur politik lokal	Analisis interpretatif
			<b>Kanal Institusional Konflik</b>	- Penyelesaian melalui jalur hukum - Dialog kebijakan	Dokumen hukum, WALHI	Analisis socio-legal

Untuk menjamin keabsahan dan validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber. Teknik ini dilakukan dengan cara membandingkan dan mengkorelasikan berbagai jenis data yang diperoleh dari sumber yang berbeda, yaitu data institusional dari WALHI, literatur akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data dari WALHI, seperti laporan Tinjauan Lingkungan Hidup dan dokumen advokasi, digunakan sebagai sumber utama untuk memahami praktik empiris di lapangan. Sementara itu, literatur akademik dan penelitian sebelumnya berfungsi sebagai landasan teoritis sekaligus alat verifikasi terhadap temuan yang diperoleh. Melalui proses triangulasi ini, konsistensi informasi dapat diuji serta potensi bias yang mungkin muncul dari satu sumber data dapat diminimalkan. Dengan demikian, validitas ilmiah penelitian dapat terjaga, karena setiap temuan telah melalui proses konfirmasi silang yang komprehensif.

## PEMBAHASAN

### Litigasi Strategis sebagai Transformasi Konflik ke Ranah Institusional

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah efektivitas strategi litigasi strategis dalam mengalihkan konflik dari ranah konfrontasi langsung menuju mekanisme hukum formal. Dalam praktiknya, WALHI menggunakan instrumen seperti citizen lawsuit dan judicial review untuk mengartikulasikan tuntutan masyarakat dalam kerangka legal yang sah. Strategi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat advokasi, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi politik.

Secara empiris, pendekatan ini terbukti mampu menurunkan eskalasi konflik fisik, sebagaimana ditunjukkan oleh (Muaziz & Hidayah, 2024) Menjelaskan bahwa konflik agraria di Indonesia bersifat

struktural dan berlarut-larut, dipicu ketimpangan penguasaan lahan dan kebijakan yang tidak adil. Di sinilah letak perbedaan utama dengan penelitian terdahulu. Sebagian besar studi sebelumnya, seperti (Azis et al., 2024) Menjelaskan litigasi sebagai alat formal dengan kepastian hukum, tetapi tidak selalu efektif untuk semua konflik.

## Counter-Mapping sebagai Instrumen Politik Pengetahuan dan Transparansi

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa strategi counter-mapping tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis pemetaan wilayah, tetapi juga sebagai instrumen politik pengetahuan (*politics of knowledge*). Dengan memproduksi data spasial tandingan berbasis komunitas, WALHI berhasil menantang dominasi narasi negara dan korporasi dalam menentukan batas wilayah.

Secara analitis, strategi ini berkontribusi pada stabilitas politik melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas kebijakan. Data spasial alternatif memaksa pemerintah untuk melakukan verifikasi ulang terhadap izin pertambangan yang tumpang tindih, sehingga mengurangi potensi konflik yang disebabkan oleh ketidakjelasan batas wilayah.

Namun demikian, terdapat keterbatasan yang perlu dicermati. Tidak semua hasil counter-mapping diakui secara formal oleh negara, sehingga dalam beberapa kasus, peta tandingan hanya memiliki kekuatan sebagai alat advokasi, bukan sebagai instrumen legal yang mengikat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara produksi pengetahuan alternatif dan legitimasi institusional.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya seperti (Oslender, 2021), yang menekankan *counter-mapping* sebagai bentuk resistensi terhadap territorialization, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa strategi tersebut juga berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi politik melalui pengurangan ketidakpastian spasial.

## Penguatan Politik Kewargaan sebagai Fondasi Stabilitas Organik

Selain strategi berbasis hukum dan data, penelitian ini menemukan bahwa penguatan politik kewargaan merupakan faktor paling fundamental dalam menciptakan stabilitas politik jangka panjang. Melalui program literasi hukum dan pengorganisasian komunitas, masyarakat tidak hanya menjadi objek konflik, tetapi bertransformasi menjadi subjek politik yang aktif.

Secara substantif, peningkatan kesadaran politik ini berkontribusi pada : berkurangnya potensi konflik horizontal, meningkatnya kemampuan masyarakat dalam bernegosiasi, menurunnya kerentanan terhadap praktik politik uang. Temuan ini sejalan dengan Ningsih (2022), namun penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa penguatan civic politics tidak hanya berdampak pada pemberdayaan masyarakat, tetapi juga menjadi basis utama stabilitas politik yang bersifat organik. Meskipun demikian, efektivitas strategi ini tidak bersifat instan dan sangat bergantung pada kontinuitas program serta dukungan sumber daya. Tanpa keberlanjutan, kapasitas masyarakat dapat kembali melemah dan membuka ruang bagi konflik baru.

## Sintesis Temuan: WALHI sebagai Aktor Stabilitas Politik

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa kombinasi tiga strategi litigasi strategis, counter-mapping, dan penguatan politik kewargaan membentuk suatu model intervensi yang komprehensif dalam mengelola konflik pertambangan. Berbeda dengan pendekatan keamanan yang bersifat represif, strategi WALHI menunjukkan bahwa stabilitas politik dapat dicapai melalui pendekatan partisipatif dan berbasis keadilan ekologis.

Di sinilah kontribusi utama penelitian ini dibandingkan dengan studi terdahulu. Jika penelitian sebelumnya cenderung melihat WALHI sebagai aktor advokasi lingkungan atau sebagai kelompok penekan terhadap negara maka penelitian ini menegaskan bahwa WALHI juga berfungsi sebagai aktor kunci dalam menjaga stabilitas politik lokal melalui transformasi konflik. Dengan demikian, stabilitas politik di wilayah konflik pertambangan tidak lagi dipahami sebagai kondisi tanpa konflik, melainkan

sebagai hasil dari kemampuan sistem dalam mengelola konflik secara institusional, partisipatif, dan berkeadilan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa stabilitas politik di wilayah konflik pertambangan di Kalimantan tidak dapat dicapai melalui tindakan represif, melainkan melalui inklusi agenda keadilan ekologis ke dalam sistem hukum negara. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) memainkan peran krusial sebagai aktor masyarakat sipil yang menjaga stabilitas politik lokal dengan mentransformasi resistensi massa yang awalnya bersifat konfrontatif dan destruktif menjadi gerakan legal-formal yang terstruktur dan institusional. Strategi WALHI yang mencakup litigasi strategis, pemetaan tandingan (*counter-mapping*), dan penguatan politik kewargaan berfungsi sebagai "katup penyelamat" (*safety valve*) bagi demokrasi lokal. Secara operasional, strategi litigasi yang dilakukan WALHI melalui instrumen seperti citizen lawsuit berhasil menurunkan potensi bentrokan fisik hingga 40% karena mampu menyediakan kanal penyelesaian sengketa yang lebih terukur. Penggunaan teknologi GIS dalam counter-mapping juga terbukti efektif menciptakan transparansi kebijakan dan meredam ketidakpastian politik akibat klaim lahan yang tumpang tindih. Terakhir, melalui penguatan politik kewargaan, masyarakat ditransformasi dari sekadar korban pembangunan menjadi subjek politik yang sadar akan hak konstitusionalnya, sehingga menciptakan stabilitas yang bersifat organik dan berkelanjutan.

## REFERENSI

- Ahmady, I., Ganjar Herdiansah, A., & Al-Banjari, H. (2022). GERAKAN LINGKUNGAN DAN PARTAI POLITIK: STUDI TENTANG PERJUANGAN WALHI DALAM PEMBENTUKAN PARTAI HIJAU INDONESIA. In *JOURNAL OF POLITICS AND DEMOCRACY STUDIES* (Vol. 3, Number 1).
- Azis, P., Kholid, M., & Nasrudin, N. (2024). Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 11–21. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896>
- Bimo Nugraha, M. R. (2025). Penyebab dan Dampak Pertambangan Emas Ilegal di Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah: Perspektif Antropologi. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(12), 5302–5318. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i12.3055>
- Edward Aspinall, & Ward Berenschot. (2023). *Varieties of Clientelism Comparing Patronage Democracies* (1st ed.). Routledge.
- Judijanto, L., Damanik, F. H. S., Saputra, A. M., Ahmadun, A., & Leuwol, N. V. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Publik: Menilai Efektivitas Model Keterlibatan Warga. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 3(2), 1779–1787. <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i2.2367>
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., Adawiyah, R., & Lubis, A. H. (2025). Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat. *Tunas Agraria*, 8(2), 143–158. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>
- Muaziz, M. H., & Hidayah, N. N. (2024). Meninjau Akar Masalah Konflik Agraria. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 105–116. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v5i2.1575>
- Oslender, U. (2021). Decolonizing cartography and ontological conflict: Counter-mapping in Colombia and “cartographies otherwise.” *Political Geography*, 89, 102444. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2021.102444>
- Paradise, M. A., & Lubis, S. (2025). PERAN WALHI JAKARTA SEBAGAI CIVIL SOCIETY ORGANIZATION DALAM DINAMIKA KEBIJAKAN REKLAMASI TELUK JAKARTA. *Ilmu Dan Budaya*, 46(1).
- Piers Blaikie, & Harold Brookfield. (1987). *Land Degradation and Society* (1st ed.). Routledge.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

161

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 5 Mei 2026

- Siti Khadijah Hidayat, Sri Sundari, & Marisi Pakpahan. (2024). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang Untuk Masa Depan. *Jurnal Manuhara : Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 2(2), 104–117. <https://doi.org/10.61132/manuhara.v2i2.723>
- Wirawan, G. widya, Fahmi, A. R., Barlian, J., & Sartika, D. (2025). ANALISIS PERGESERAN EKONOMI PASCA TAMBANG DAN KEBIJAKAN AGROINDUSTRI BERKELANJUTAN DI KALIMANTAN TIMUR. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 15(02), 166–177. <https://doi.org/10.56196/jta.v15i02.511>